

ABSTRAK

Pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung proses pembelajaran yang aman, nyaman, dan berkualitas. Namun, di SD Negeri 013817 Sei Pasir Kabupaten Asahan masih ditemukan beberapa sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya memenuhi standar yang ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi standar sarana dan prasarana serta tingkat kelayakannya di SD Negeri 013817 Sei Pasir Kabupaten Asahan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis implementasi menggunakan teori George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi standar sarana dan prasarana di SD Negeri 013817 Sei Pasir telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku melalui pendataan dan pembaruan Dapodik, pengajuan bantuan, pemeliharaan fasilitas, serta koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, tetapi belum berjalan secara optimal. Dari aspek komunikasi, penyampaian informasi dan koordinasi antar pihak telah berjalan dengan baik. Dari aspek sumber daya, masih terdapat keterbatasan anggaran, fasilitas, media pembelajaran, dan kewenangan sekolah dalam melakukan rehabilitasi. Dari aspek disposisi, para pelaksana menunjukkan komitmen dan tanggung jawab dalam mendukung pemenuhan standar. Sementara itu, dari aspek struktur birokrasi, mekanisme dan pembagian tugas telah berjalan sesuai prosedur, tetapi proses administrasi, verifikasi, dan penetapan skala prioritas menyebabkan realisasi bantuan membutuhkan waktu. Secara keseluruhan, sarana dan prasarana di SD Negeri 013817 Sei Pasir berada pada kategori cukup layak, tetapi beberapa ruang kelas, fasilitas sanitasi, dan media pembelajaran berbasis teknologi belum sepenuhnya memenuhi standar kelayakan. Faktor penghambat utama meliputi keterbatasan anggaran, belum terealisasinya bantuan fisik pemerintah, kerusakan bangunan dan fasilitas sanitasi, keterbatasan media pembelajaran, serta proses birokrasi dan penentuan skala prioritas bantuan. Oleh karena itu, disarankan kepada Dinas Pendidikan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan untuk mempercepat realisasi bantuan rehabilitasi, meningkatkan dukungan anggaran, serta memperhatikan tingkat kerusakan dan kebutuhan riil sekolah dalam penentuan prioritas. Pihak sekolah juga diharapkan terus memperbarui data Dapodik, menjaga komunikasi dengan pihak terkait, serta mengoptimalkan pemeliharaan sarana dan prasarana yang tersedia.

Kata kunci: *Implementasi Standar Sarana dan Prasarana, Pendidikan Anak Usia Dini.*